

**PENERIMAAN MASYARAKAT KOTA MAKASSAR.,  
KABUPATEN GOWA DAN KABUPATEN SINJAI TERHADAP  
CALON GUBERNUR SULAWESI SELATAN 2013-2018**

**SKRIPSI**

Untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk mencapai derajat sarjana S-1

Program studi ilmu Politik



Oleh

Muhammad Fadly Gunawan Pria Utama

E11107045

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU  
POLITIK**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

## INTISARI

**Muhammad Fadly Gunawan pria Hutama**, Nomor Pokok E111 07 045, Program Studi Ilmu Politik, Jurusan Politik Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, menyusun Skripsi dengan judul : **“Penerimaan masyarakat Kota Makassar, Kabupaten Gowa, dan kabupaten Sinjai terhadap calon Gubernur Sulawesi Selatan 2013-2018”** dibawah bimbingan Prof. **Dr. Armin, M.Sidan Dr. Gustiana A. Kambo, M.Si.**

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui tingkat penerimaan masyarakat Kota Makassar, Kabupaten Gowa dan kabupaten Sinjai terhadap calon Gubernur yang mencalonkan diri pada periode 2013-2018. Tipe penelitian yang dilakukan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara terhadap informan untuk mendapatkan informasi sebanyak mungkin dengan pertanyaan mengenai masalah yang diteliti dan penelitian pustaka dengan mengumpulkan data melalui dokumen-dokument tertulis, buku-buku, Laporan-laporan, dan informasi bi data calon.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa persilangan dari ketiga daerah tersebut dan ketiga calon tersebut menghasilkan gambaran dan rincian analisis penerimaan sosial masyarakat terhadap calon Gubernur.

## ABSTRACTION

**Muhammad FadlyGunawanpriaHutama**, NomorPokok E111 07 045, Political Science,Political and governmental science , Faculty of Social dan political science HasanuddinUniversity,make Script with Headline: **“Penerimaanmasyarakat Kota Makassar, KabupatenGowa, dankabupatenSinjaiterhadapcalonGubernur Sulawesi Selatan 2013-2018”** under control **Prof. Dr. Armin, M.Sidan Dr. Gustiana A. Kambo, M.Si.**

This Script have been made for knowing percentage of social acceptance Makassar City, Gowa District and Sinjai district of Governor calon . This Obsevation use kualitative Descriptive method. The technic join Date use interview method to direct informan about somethng that want to observe.

From this observe we can get any further information about subject from any document. Books, report and biodate information That may you can imagine about acceptance for three of him .A writer take this three place so that can concluding abou three of base from each person.

## KATA PENGANTAR

PujiSyukur Alhamdulillah penulispanjatkankehadirat Allah SWT atasberkat, rahmatdantaufikdanhidayah-Nya, penyusunanskripsi yang berjudul “penerimaanmasyarakat Kota Makassar, KabupatenGowadanKabupatenSinjaiterhadapcalonGubernur Sulawesi Selatan periode 2013-2018

Penulismenyadaribahwadalam proses penulisananskripsiinibanyakmengalamikendala, namunberkatbantuan, bimbingan, kerjasamadariberbagaipihakdanberkahdari Allah SWT sehinggakendala-kendala yang dihadapidapatdiatasi. Untukitupenulismengucapkanterimakasihdanpenghargaankepada Prof. Dr. Armin, M.Siselakupembimbingdanibu Dr. Gustiana A. Kambo, S.IP, M.Siselakupembimbing II yang telahdengansabar , tekun, tulusdanikhlasmeluangkanwaktu, tenaga, danpikiranmemberikanbimbingan, motivasi, arahan, dan saran-saran yang sangatberhargakepadapenulisselamamenyusunskripsi.

Selanjutnyaucapanterimakasihpenulisdisampaikan pula kepada :

1. RektorUniversitasHasanuddin.
2. DekanFakultasIlmuSosialdanIlmuPolitikUniversitasHasanuddin.
3. BapakdanIbuDosentimpengujiSkripsi.
4. BapakdanIbuDosenFakultasIlmuSosialdanIlmuPolitikUniversitasHasanuddin.
5. Orang TuaPenulis Drs. MasfarHunawa, SE,Ak . MM danIbuYayaRabiana yang telahmensupportpenulis moral maupunmateri.
6. Teman-temanAngkatan 2007 dan junior senior yang telahmemberimasukandanbantuan moral maupunmaterisehinggaskripsidapatdirampungkanolrhpenulis.
7. KeluargaSanakSaudara yang berdomisili di Makassar terimakasihkarenatelahmensupportpenulis.
8. Staff danpegawai di lingkupFakultasdanUniversitasHasanuddin.

Makassar, April 2014

Muhammad FadlyGunawan P. H

**DAFTAR TABEL**

<b>Tabel 1.1</b> .....	<b>24</b>
<b>Tabel 1.2</b> .....	<b>32</b>

<b>Sampul</b> .....	i
<b>Halaman Pengesahan</b> .....	ii
<b>HalamanPenerimaan</b> .....	iii
<b>Abstraksi</b> .....	iv
<b>Halaman Persembahan</b> .....	v
<b>Daftar Isi</b> .....	ix
<b>Daftar Tabel</b> .....	xiv
<b>BAB I Pendahuluan</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	13
C. Tujuan Penelitian .....	13
D. Manfaat Penelitian .....	13
<b>BAB II Tinjauan Pustaka</b>	
A. Konsep Penerimaan sosial .....	15
B. TeoriAktorPolitik.....	18
C. PemilukadaLangsung.....	22
D. Kerangka Pemikiran.....	23
E. SkemaKerangkaFikir.....	24
<b>BAB III Metode Penelitian</b>	
A. Objek Penelitian .....	24
B. DasardanTipePenelitian.....	24
C. Sumber Data .....	25
D. Teknik Pengumpulan Data.....	26

E. Teknik Analisa.....	28
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN</b>	
A. SyahulYasinLimpo .....	29
B. IlhamAriefSiradjuddin .....	31
C. AndiRudiyantoAsapa.....	33
<b>BAB V HASIL PENELITIAN</b>	
A. PenerimaanMasyarakatterhadapIlhamAriefSiradjuddin .....	36
B. PenerimaanmasyarakatterhadapSyahrulYasinLimpo .....	39
C. PenerimaanMasyarakatterhadapAndiRudiyantoAsapa.....	42
<b>BAB VI PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	45
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>47</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Aspek yang harus dimiliki oleh figur atau aktor politik adalah akseptabilitas yang tinggi. Penelitian mengenai penerimaan masyarakat terhadap calon Gubernur Sulawesi Selatan 2013–2018, Setidaknya ingin menggambarkan banyak hal mengenai tentang penerimaan masyarakat (akseptabilitas) terhadap calon Gubernur yang akan dipilih dalam Pemilukada tanggal 22 Januari 2013 di Sulawesi Selatan. Akseptabilitas atau penerimaan calon Gubernur Sulawesi Selatan pada Pemilukada 2013 mendatang bukan semata-mata ditentukan oleh banyaknya modal yang dimilikinya dan partai besar yang mendukungnya. Seorang calon mesti seorang tokoh yang dikenal luas dan telah mengabdikan dirinya untuk kemajuan Sulawesi Selatan. Masyarakat Sulawesi Selatan berharap pemimpin mereka mendatang adalah pemimpin yang mampu mengartikulasikan dan mengaktualisasikan berbagai program yang bertujuan mensejahterakan masyarakat. Selain itu, pemimpin Sulawesi Selatan ke depan haruslah pemimpin yang *visioner*, proaktif menghadapi berbagai problem yang muncul, mendahulukan kepentingan rakyat di atas segala-galanya dan



mampu membangun sinergi terhadap keragaman potensi yang ada di Sulawesi Selatan.

Bahasan tentang penerimaan masyarakat terhadap calon kepala daerah yang ideal telah dibahas sebelumnya. Pada dasarnya sebelum kita mengkaji ke sana kita perlu mengetahui bahwa penerimaan masyarakat (akseptabilitas) itu ada dikarenakan suatu negara yang menganut sistem demokrasi memberikan kebebasan kepada rakyatnya untuk menilai calon mana yang menurut masyarakat yang baik dan layak menjadi seorang pemimpin.

Masyarakat yang memberi penilaian terhadap calon pemimpin dirumuskan sebagai kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik, keikutsertaan seseorang dalam hal ini dapat sebagai warga negara biasa maupun sebagai pengambil keputusan.<sup>1</sup>

Penelitian ini memfokuskan pada penerimaan masyarakat terhadap calon Gubernur Sulawesi Selatan periode 2013–2018 di tiga daerah kota/kabupaten yang dianggap sebagai basis terbesar dari ketiga calon yaitu Makassar, Gowa maupun Sinjai, yang selanjutnya ingin menampilkan ke mana ataupun pada calon yang mana masyarakat Sulawesi Selatan dapat dinilai layak untuk memimpin Sulawesi Selatan. Penelitian ini juga menelusuri hal-hal

---

<sup>1</sup> Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Halaman 30-35.

yang mendasari dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan masyarakat terhadap calon Gubernur Sulawesi Selatan periode 2013-2018 untuk menjadi pertimbangan dan proses sebelum memberikan suaranya pada Pemilukada.

Hasil verifikasi KPU Sulawesi Selatan telah menetapkan tiga pasang yang mencalonkan diri dalam pertarungan Pemilukada Gubernur dan wakil Gubernur Sulawesi Selatan 2013-2018.

Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada merupakan sebuah cara yang dirasa paling demokratis dalam memilih dan menentukan Kepala Daerah di suatu wilayah. Pilkada menjadi prasyarat utama untuk menandai apakah suatu negara demokrasi terjadi atau tidak dan pilkada menjadi sebuah ruang untuk menunjukkan kekuasaan rakyat atas *elite*-nya.<sup>2</sup> Dasar hukum penyelenggaraan pilkada adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pilkada di Indonesia pertama kali diadakan di Kabupaten Kutai Kartanegara pada 1 Juni 2005. Setelah lima tahun Pilkada diselenggarakan di Indonesia, Pilkada menemui banyak persoalan-persoalan baik dari sisi pemilih, calon, maupun penyelenggara. Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik

---

<sup>2</sup>Rumandi, "Menjadi Pemilih Cerdas",  
<http://www.suarapembaruan.com/News/2007/08/06/Jabotabe/jab08.htm>, diunduh 25 April 2010.

Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945<sup>3</sup>. Sebelum diberlakukannya undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Namun sejak Juni 2005 Indonesia menganut system pemilihan Kepala Daerah secara langsung.

Menurut Rozali Abdullah, beberapa alasan mengapa diharuskan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung<sup>4</sup>, adalah:

Warga masyarakat di daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari warga masyarakat Indonesia secara keseluruhan, yang mereka juga berhak atas kedaulatan yang merupakan hak asasi mereka, yang hak tersebut dijamin dalam konstitusi kita Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Oleh karena itu, warga masyarakat di daerah, berdasarkan kedaulatan yang mereka punya, diberikan hak untuk menentukan nasib daerahnya masing-masing, antara lain dengan memilih Kepala Daerah secara langsung. Sejak Pemilu legislatif 5 april 2004, anggota DPRD dipilih secara langsung oleh rakyat melalui sistem proporsional dengan daftar calon terbuka. Apabila Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tetap dipilih oleh DPRD, bukan dipilih langsung oleh

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, pasal 1 ayat 4.

<sup>4</sup> Lihat: Rozali Abdullah, *pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Derah secara Langsung*, PT Raja Grafindo, 2005, hlm 53-55

rakyat, maka tingkat legitimasi yang dimiliki DPRD jauh lebih tinggi dari tingkat legitimasi yang dimiliki oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pasal 16 (2) UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa DPRD, sebagai Badan Legislatif Daerah, berkedudukan sejajar dan menjadi mitra pemerintah daerah. Sementara itu, menurut Pasal 34 (1) UU No. 22 Tahun 1999 Kepala Daerah dipilih oleh DPRD dan menurut pasal 32 ayat 2 jo pasal 32 ayat 3 UU No.22 Tahun 1999, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bertanggung jawab kepada DPRD. Logikanya apabila Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bertanggung jawab kepada DPRD maka kedudukan DPRD lebih tinggi daripada Kepala Daerah. Oleh karena itu, untuk memberikan mitra sejajar dan kedudukan sejajar antar Kepala Daerah dan DPRD maka keduanya harus sama-sama dipilih oleh rakyat. Dalam UU diatas, kewenangan DPRD untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sudah dicabut. Sering kita mendengar isu politik uang dalam proses pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh DPRD. Masalah politik uang ini terjadi karena begitu besarnya wewenang yang dimiliki oleh DPRD dalam proses pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Oleh karena itu, apabila dilakukan pemilihan Kepala Daerah secara langsung kemungkinan terjadinya politik uang bisa dicegah atau setidaknya dikurangi.

Undang-undang nomor 22 tahun 2007 tentang penyelenggara pemilihan umum, mengamanatkan bahwa Pilkada dibawa kedalam ranah Pemilihan umum. Sehingga secara resmi dinamakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pilkada yang pertama kali diselenggarakan berdasarkan undang-undang ini adalah Pilkada DKI Jakarta. Pilkada diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota. Khusus di Nanggroe Aceh Darussalam, Pilkada diselenggarakan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) dengan diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Aceh (Panwaslih Aceh).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 56, peserta Pilkada adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Ketentuan ini diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa peserta pilkada juga dapat berasal dari pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang. Undang-undang ini menindaklanjuti keputusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan beberapa pasal menyangkut peserta Pilkada dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Khusus di Nanggroe Aceh Darussalam, peserta Pilkada juga dapat diusulkan oleh partai politik lokal. Pilkada langsung sebagai pengejawantahan dari demokratisasi lokal telah dilaksanakan di berbagai daerah di Indonesia. Banyak evaluasi dan dan analisa mengenai pelenggaraannya

menyimpulkan suatu kondisi yang sama, yaitu bahwa penyelenggaraan Pilkada langsung belum sepenuhnya berjalan sesuai yang diharapkan. Penerapan di lapangan masih menyisakan masalah yang mendasar. Pilkada langsung masih didominasi kelompok elitis tertentu melalui oligarki politik, sehingga pilkada langsung menjadi proses demokratisasi semu<sup>5</sup>. Partisipasi masyarakat lebih bersifat di mobilisasi. Hal ini sama halnya dengan proses politik sebagai suatu penguatan demokrasi lokal masih belum terjadi, justru konflik-konflik horizontal yang mengarah kepada anarkisme cenderung sering terjadi.

Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan. Sehingga demokrasi dapat diartikan pemerintahan dari rakyat dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Pemerintahan yang kewenangannya pada rakyat. Semua anggota masyarakat (yang memenuhi syarat ) diikutsertakan dalam kehidupan kenegaraan dalam aktivitas pemilu. Pelaksanaan dari demokrasi ini telah dilakukan dari dahulu di berbagai daerah di Indonesia hingga Indonesia merdeka sampai sekarang ini. Demokrasi di negara Indonesia bersumberkan dari Pancasila dan UUD '45 sehingga sering disebut dengan demokrasi pancasila. Demokrasi Pancasila berintikan musyawarah untuk mencapai mufakat, dengan berpangkal tolak pada faham kekeluargaan dan kegotongroyongan Indonesia pertamakali dalam melaksanakan Pemilu pada akhir tahun

---

<sup>5</sup> Silahuddin, Edah Jubaedah, dan Wawan Dharma S, *Evaluasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Langsung*, 2007, hlm iii

1955 yang diikuti oleh banyak partai ataupun perseorangan. Dan pada tahun 2004 telah dilaksanakan pemilu yang secara langsung untuk memilih wakil wakil rakyat serta presiden dan wakilnya. Pada tahun 2005 telah dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah atau sering disebut pilkada langsung. Dan pada tahun 2009 pun kembali lagi diadakan Pilkada. Pilkada ini merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat. Ada lima pertimbangan penting penyelenggaraan pilkada langsung bagi perkembangan demokrasi di Indonesia.

1. Pilkada langsung merupakan jawaban atas tuntutan aspirasi rakyat karena pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, bahkan kepala desa selama ini telah dilakukan secara langsung.
2. Pilkada langsung merupakan perwujudan konstitusi dan UUD 1945. Seperti telah diamanatkan Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945, Gubernur, Bupati dan Wali Kota, masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Hal ini telah diatur dalam UU No 32 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
3. Pilkada langsung sebagai sarana pembelajaran demokrasi bagi rakyat. Pilkada juga menjadi media pembelajaran praktek berdemokrasi bagi rakyat yang diharapkan dapat membentuk kesadaran kolektif segenap unsur bangsa tentang pentingnya memilih pemimpin yang benar sesuai nuraninya.

4. Pilkada langsung sebagai sarana untuk memperkuat otonomi daerah. Keberhasilan otonomi daerah salah satunya juga ditentukan oleh pemimpin lokal. Semakin baik pemimpin lokal yang dihasilkan dalam pilkada langsung, maka komitmen pemimpin lokal dalam mewujudkan tujuan otonomi daerah, antara lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memerhatikan kepentingan dan aspirasi masyarakat agar dapat diwujudkan.
5. Pilkada langsung merupakan sarana penting bagi proses kaderisasi kepemimpinan nasional. Disadari atau tidak, namun kepemimpinan nasional yang kita miliki amat terbatas. Dari jumlah penduduk Indonesia yang begitu banyaknya, hanya segelintir orang saja yang memiliki kemampuan untuk menjadi seorang pemimpin. Karena itu, harapan akan lahirnya pemimpin nasional justru dari pilkada langsung ini.

Tahun 2013 merupakan tahun politik di Sulawesi Selatan dimana rakyatnya dimama masyarakat Sulawesi Selatan memilih calon kepala daerahnya sebagai Gubernur untuk 5 tahun ke depan. Ada tiga aspek yang mempengaruhi kelayakan dalam menilai calon Pemimpin kepala daerah yaitu popularitas atau ketenaran personal daripda calon, Akseptabilitas atau tingkat penerimaan sosial seorang calon di mata masyarakat dan juga elektabilitas yaitu tingkat keterpilihan calon yang ditentukan pada penyelenggaraan pemilu.



Pemerintahan Sulawesi Selatan pada periode 2013-2018 memiliki tiga orang calon Gubernur yaitu Syahrul Yasin Limpo , Ilham Arief Siradjuddin dan Andi Rudyanto Asapa.

**Syahrul Yasin Limpo** (lahir di Makassar, Sulawesi Selatan, 16 Maret 1955; umur 59 tahun) adalah seorang politikus Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Selatan. Ia memenangi pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan 2007-2012 dan 2013-2018 kedua periode bersama pasangannya sebagai wakil gubernur ialah Agus Arifin Nu'mang.

DR. H. Syahrul Yasin Limpo adalah anak kedua dari pasangan H. Muh. Yasin Limpo dengan Hj. Nurhayati Yasin Limpo. Syahrul Yasin Limpo saat ini menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Selatan yang pertama kali dipilih secara langsung. Sebelum menjabat sebagai Gubernur, Syahrul Yasin Limpo pernah menjabat sebagai Bupati di Kabupaten Gowa selama dua periode, kemudian menjabat Wakil Gubernur selama satu periode mendampingi Amin Syam, sebelum akhirnya memenangkan pertarungan dengan Amin Syam dalam pilkada Sulsel pada tahun 2007 setelah keduanya sama-sama maju bertarung sebagai calon petahana.

Pada pilkada Sulawesi Selatan tahun 2007, Syahrul Yasin Limpo berpasangan dengan Agus Arifin Nu'mang (saat itu menjabat sebagai ketua DPRD Sulsel) yang merupakan salah satu pimpinan DPD Golkar

Sulsel. Pasangan tersebut diusung oleh koalisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) dan Partai Damai Sejahtera (PDS). Sementara rival terberat Syahrul yaitu Amin Syam yang juga ketua DPD Golkar Sulsel di usung oleh koalisi Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) serta Partai Demokrat, ditambah sejumlah partai kecil lainnya. Setelah menjalani persaingan yang ketat, Syahrul Yasin Limpo akhirnya memenangi pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan 2007 bersama pasangannya, Agus Arifin Nu'mang.

Gubernur yang terkenal dengan *tagline* "Sayang" ini (Sayang merupakan singkatan dari Syahrul Yasin Limpo – Agus Arifin Nu'mang) ini mulai merealisasikan ide-idenya, antara lain pendidikan gratis dan kesehatan gratis. Syahrul mengungkapkan bahwa hal dasar dalam menyejahterakan rakyat dan membuat suatu bangsa maju terletak dari tingkat pendidikan suatu rakyat atau bangsa dan hak dasar manusia sebenarnya adalah kesehatan, karena tidak akan makmur suatu bangsa bila kesehatannya tidak diperhatikan. Oleh karena itu Syahrul Yasin Limpo berusaha mewujudkan ide ini, dan sekarang ini dapat dilihat, pendidikan gratis telah direalisasikan di Kabupaten Gowa dan daerah lainnya sampai tingkat SMA. Dibidang kesehatan, rumah sakit yang ditunjuk pemerintah

menggratiskan biaya kesehatan yakni melayani pasien dengan hanya menerima pembayaran fotokopi KTP dan Kartu Keluarga.<sup>6</sup>

**Ir. H. Ilham Arief Sirajuddin, M.M.** (lahir di Gowa, Sulawesi Selatan, 16 September 1965; umur 48 tahun) adalah Walikota Makassar periode 2004-2009 dan 2009-2014. Aco demikian sapaan akrab Ilham, menjabat Walikota Makassar melalui Partai Golkar. Ia juga merupakan manajer dan ketua umum tim sepak bola PSM Makassar. Pada tahun 2008 untuk memenuhi syarat sebagai calon Walikota, beliau memundurkan diri dari jabatannya dan di gantikan oleh wakilnya yaitu Ir. H. Andi Herry Iskandar, M.si. Pada tahun 2009 Ilham atau yang akrab disapa Aco memundurka diri dari Partai Golkar. Pada tahun 2010 Ilham memenangkan Musyawarah Daerah Partai Demokrat Provinsi Sulawesi Selatan. Ilham juga adalah Ketua Organisasi Masyarakat Nasional Demokrat dan menjadi salah satu dari 45 deklarator Nasional Demokrat. Pencalonan Ilham Arief Siradjuddin menggandeng Azis Qahhar Mudzakkar dengan partai Demokrat sebagai partai pengusung.<sup>7</sup>

**Andi Rudiyanto Asapa** – adalah calon Gubernur Sulsel 2013, saat ini Andi Rudiyanto Asapa adalah Bupati Kabupaten Sinjai, Dia juga Ketua partai Gerindra Sulsel. Andi Rudiyanto Assapa Mengusung Tagline Garudana For Sulsel dalam ajang Pilgub Sulawesi selatan yang berpasangan dengan Andi Nawir Pasinringi. Rudi begitu biasa disapa

---

<sup>6</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Syahrul\\_Yasin\\_Limpo](http://id.wikipedia.org/wiki/Syahrul_Yasin_Limpo)

<sup>7</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Ilham\\_Arief\\_Sirajuddin](http://id.wikipedia.org/wiki/Ilham_Arief_Sirajuddin)

adalah seorang pengacara praktek, bahkan pernah menjadi direktur LBH Makassar. Kemudian terjun ke dunia politik dengan bergabung ke PDIP yang kemudian mengantarkan dirinya menjadi Bupati di Kab. Sinjai. Namun karena pergolakan di PDIP saat akan Pemilihan Ketua Umum PDIP Sulsel, Rudi memilih hengkang dari PDIP dan bergabung di Gerindra.

Di partai bentukan Prabowo ini, Rudi dipercaya jadi Ketua Umum Gerindra Sulsel. Berkat support dari Prabowo dan Gerindra akhirnya Rudi memutuskan untuk ikut bertarung dalam Pilgub Sulsel. Didukung 19 partai dengan perolehan 15,92% suara, Rudi yang berpasangan dengan Andi Nawir Pasinringi, secara resmi mendaftar Kamis 13 September 2012.<sup>8</sup>

## **B.RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana tingkat penerimaan masyarakat Kota Makassar, kabupaten Gowa dan Kabupaten Sinjai terhadap calon Gubernur Sulawesi Selatan periode 2013-2018?

## **C.TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk Menggambarkan dan menganalisis faktor-faktor penerimaan masyarakat kota Makassar, Kabupaten Gowa, Kabupaten Sinjai terhadap Calon Gubernur Sulawesi Selatan periode 2013-2018.

## **D.MANFAAT PENELITIAN**

---

<sup>8</sup> <http://mitratvsidrap.blogspot.com/2013/01/profil-calon-pemimpin-sulsel-2013-2018.html>

## 1. Manfaat Akademik

- a. Menjawab fenomena sosial politik yang ada.
- b. Menunjukkan secara ilmiah gambaran akseptabilitas Gubernur di masyarakat Makassar, Gowa dan Sinjai.
- c. Memperkaya kahazanah kajian ilmu politik dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai prasyarat untuk memenuhi gelar sarjana ilmu politik.
- b. Untuk membantu para pelaku politik memahami realitas politik di Sulawesi Selatan.
- c. Memberi pemahaman bahwa kemunculan jaringan politik keluarga dapat memperkuat kekuatan politik.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. KONSEP PENERIMAAN SOSIAL**

Penerimaan sosial atau dalam istilah asingnya adalah *Acceptability* merupakan salah satu indikator penilaian dalam mengukur tingkat keberhasilan calon pemimpin yang akan bertarung dalam Pemilu maupun Pemilukada selain daripada dua indikator lainnya yaitu popularitas dan elektabilitas. Akseptabilitas dan elektabilitas memiliki keterkaitan yang sangat erat calon yang akseptabilitasnya tinggi dapat dipastikan pula memiliki elektabilitas yang tinggi pula. Secara konsep akseptabilitas dan elektabilitas itu berbeda karena elektabilitas itu sendiri berarti tingkat keterpilihan dan juga tingkat akseptabilitas belum tentu menentukan tingkat elektabilitas. Akseptabilitas atau penerimaan sosial adalah menyangkut tentang kapabilitas, kelayakan, maupun perjalanan politik dari seorang calon. Masyarakat yang menilai aktor tersebut akan menilai dan mempersepsikan tentang diri dari calon yang maju dalam pertarungan politik dalam mencapai kekuasaan.

Ruben D. Brent<sup>9</sup> mengemukakan bahwa ada 7 poin yang mempengaruhi penerimaan masyarakat terhadap suatu kepemimpinan yang berkaitan dengan aktor politik 7 poin tersebut, yaitu:

1. Proximity/kedekatan : Proximity atau kedekatan merupakan faktor yang menjadi salah satu yang mempengaruhi penerimaan masyarakat terhadap individu, pelaku serta tokoh politik. Kedekatan ini bisa berupa kedekatan yang dibangun oleh seorang aktor politik kepada masyarakat melalui sosialisasi politik, pencitraan atau bisa juga kedekatan yang berupa hubungan darah antara pelaku politik dengan individual masyarakat.

2. Attractiveness/daya tarik : Seorang aktor politik haruslah mempunyai daya tarik yang dimilikinya sehingga ia dikenal oleh berbagai lapisan masyarakat yang mempengaruhi daya penerimaannya yang menjadi ciri khas ataupun pembeda diantara aktor-aktor lain yang menjadi rivalnya.

3. Similarity/kesamaan : Unsur ini mengukur dari karakteristik sosial maupun pengelompokan sosial yang mempengaruhinya yaitu berupa beberapa aspek seperti kesamaan wilayah,suku,agama,umur,jenis kelamin,pendidikan,pekerjaan, maupun kesamaan ideologi.

---

<sup>9</sup> Ruben D. Brent, *Communication and Human Behaviour*, 192 hal 137.

4. *Kredibility and authority/kepercayaan dan kewibawaan* :

Dalam pertarungan pencapaian kekuasaan di negara demokrasi yang menganut sistem pemilihan langsung dimana masyarakat sebagai subjek penentu individu yang berada pada level kekuasaan, tentunya kepercayaan dalam mengelola pemerintahan harus bisa dibuktikan oleh kandidat khususnya hal-hal yang berkenaan dengan kesejahteraan masyarakat. Pemimpin juga harus memiliki wibawa yang dianggap masyarakat sebagai pengayom mereka agar masyarakat merasa memiliki pemimpin yang menjadi pelindung dan pengayom mereka.

5. *Motivation dan intents/motivasi dan penawaran* : Motivasi

dan penawaran dari aktor politik yang menjadi kandidat sangatlah penting dalam mempengaruhi akseptabilitasnya dalam masyarakat. Hal ini berkenaan dengan penilaian masyarakat terhadap aspek penyelesaian masalah-masalah sosial yang berkaitan langsung dengan masyarakat. Jika seorang aktor memiliki motivasi dan penawaran yang baik maka masyarakat memberikan penilaian kepadanya yang akan menjadi berupa penerimaan yang baik pula.

6. *Delivery/cara menyampaikan pesan* : Pesan yang

disampaikan kepada masyarakat tentang pribadi aktor merupakan faktor penting dalam akseptabilitas aktor politik yang dimana jika penyampaian pesan itu baik maka output dari masyarakat akan baik



pula tentulah sebaliknya jika pesan yang disampaikan kepada masyarakat buruk maka penolakan akan terjadi di masyarakat. Media yang digunakan dalam penyampaian pesan pun kepada masyarakat menentukan penerimaan sosialnya di masyarakat.

7. Status, power and Authority/status,kekuatan politik dan kewenangan : Faktor ini melihat status daripada aktor, kekuatan-kekuatan politik yang mensupport serta cakupan kewenangannya di dalam masyarakat.

Ketujuh unsur diatas dapat ditarik kesimpulan awal bahwa unsur ini harus dipenuhi oleh kandidat Gubernur yang bertarung dalam pemilukada Sulawesi Selatan 2013 mendatang agar dapat memanfaatkan secara eksploitatif dalam menggalang dukungan masyarakat dan menentukan akseptabilitasnya.

## **B. TEORI AKTOR POLITIK**

Aktor berasal dari kata kerja bahasa Latin *agere*, yang berarti “berbuat, melakukan”. orang yang menumbuhkan, orang yang meletakkan dasar, perintis, pencipta, pengarang. *Auctor* merupakan asal-usul untuk kata Inggris *author* yang kita kenal dalam arti “pengarang” atau “penulis”. Aktor mempunyai arti lebih luas; pembuat atau pelaku. Aktor politik berarti pelaku yang mempunyai kekuasaan dalam sistem politik. Berbicara

mengenai politik tidak terlepas dari para Aktor. Aktor didefinisikan sebagai mereka yang berhubungan dengan, atau memiliki, posisi penting. Aktor politik adalah manusia terpilih (*the chosen people*). Mereka adalah pribadi unggul yang mempunyai hati nurani, kecerdasan, dan kedewasaan yang akan membimbing warga negaranya menjadi lebih maju dan mandiri.

Aktor yang dimaksud disini bukanlah aktor dalam konteks besar seperti yang dikemukakan oleh *Linz* dan *Stephan*, yang diantaranya *the state*, *political society*, *economic society*, dan *civil society*, akan tetapi aktor yang dimaksud disini adalah individu yang berada dalam sebuah organisasi politik.

Suatu keputusan akan dapat menyatakan alasan-alasan mengapa orang mengambil sikap tertentu dalam momen waktu tertentu dan jika kita dapat menunjukkan bahwa kombinasi dari tindakan dan reaksi telah menimbulkan keputusan itu. Sesungguhnya merupakan suatu persyaratan yang berlebih-lebihan dan kita harus puas dengan perkiraan yang secara relatif lemah untuk suatu eksplanasi yang lengkap. Mulai dengan itu kita harus dapat mengidentifikasi aktor-aktor<sup>10</sup>. Teori aktor disini merupakan buah atau turunan dari pendekatan perilaku (*behavioral approach*) dalam menganalisis masalah politik.

Asumsi awal adalah bahwa tidak ada gunanya membahas lembaga-lembaga formal, karena pembahasan seperti itu tidak banyak memberi informasi mengenai proses politik yang sebenarnya. Sebaliknya,

---

<sup>10</sup> *Ibid*, Amal Ichlasul, hlm 127

akan lebih bermanfaat untuk mempelajari perilaku manusia karena merupakan gejala yang benar-benar dapat diamati. Pembahasan mengenai perilaku aktor bisa saja terbatas pada perorangan, tetapi dapat juga mencakup kesatuan yang lebih besar seperti organisasi kemasyarakatan, kelompok elite, gerakan nasional atau suatu masyarakat politik (*polity*).<sup>11</sup> Pendekatan ini tidak melihat lembaga sebagai titik sentral atau sebagai aktor yang independen, tetapi hanya sebagai kerangka bagi kegiatan manusia. Penganut teori ini tidak hanya mempelajari institusi-institusi (lembaga), tetapi juga manusia yang ada didalamnya. Jika ingin mempelajari kepemimpinan seorang pejabat politik, maka yang akan dibahas adalah perilaku atau individu pejabat politik tersebut. Pendekatan atau teori aktor, kesulitan berpusat pada kesulitan dalam penentuan seluruh bidang aktor-aktor yang kita anggap paling tidak sebagian merupakan instrumen dalam proses keputusan.

Identifikasi mengenai siapa yang termasuk dalam kategori aktor politik, maka terdapat tiga metode yakni;

A. *Metode Posisi*, aktor politik adalah mereka yang menduduki posisi atau jabatan strategis dalam sistem politik. Jabatan strategis yaitu dapat membuat keputusan dan kebijakan dan dinyatakan atas nama Negara. aktor ini jumlahnya ratusan mencakup para pemegang jabatan tinggi dalam pemerintahan, parpol, kelompok

---

<sup>11</sup> Miriam Budiardjo, "*Dasar-Dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi)*", Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm 74

kepentingan. Para elit politik ini setiap hari membuat keputusan penting untuk melayani berjuta-juta rakyat.

B. *Metode Reputasi*, aktor politik ditentukan berdasarkan reputasi dan kemampuan dalam memproses berbagai permasalahan dan kemudian dirumuskan menjadi keputusan politik yang berdampak pada kehidupan masyarakat.

C. *Metode Pengaruh*, aktor politik adalah orang-orang yang mempunyai pengaruh pada berbagai tingkatan kekuasaan. Orang ini memiliki kemampuan dalam mengendalikan masyarakat sesuai kemampuan pengaruh yang dimiliki, sehingga masyarakat secara spontan mentaati para elit politik. Oleh karena itu orang yang berpengaruh dalam masyarakat dapat dikategorikan sebagai elit politik.

Ketiga metode penentuan aktor tersebut diakui dan dianut oleh berbagai Negara. Namun ada negara yang dominan menggunakan metode posisi atau metode reputasi. Disamping itu ada juga Negara yang mengkombinasikan ketiga metode tersebut untuk memperoleh hasil yang sesuai dalam mengkategorikan mereka yang tergolong sebagai aktor politik. Teori aktor politik berkenaan dengan personal atau individu yang berada dalam suatu lingkup atau organisasi politik yang mempunyai pengaruh yang lebih besar dibanding individu-individu lainnya. Kepribadian atau personality dalam politik yang dimiliki aktor menentukan penilaian masyarakat terhadapnya.

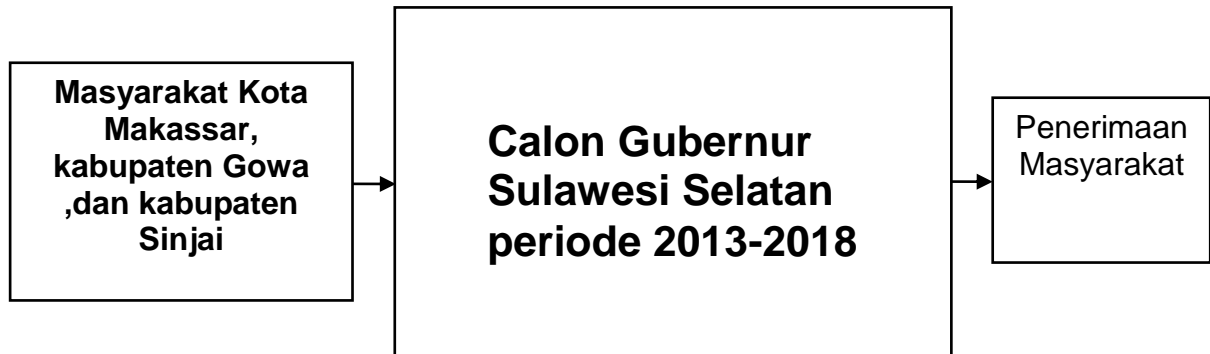
### **C. PEMILUKADA LANGSUNG**

Sejak runtuhnya orde baru tahun 1998, Indonesia telah tiga kali melaksanakan pemilihan umum yaitu 1999, 2004 dan 2009 dengan sistem multi partai. Dengan sistem multi partai terjadi persaingan terbuka antara partai politik/ kontestan untuk melakukan metode pendekatan dalam memperoleh suara terbanyak untuk memenangkan pemilu. Pemilihan umum presiden dan wakil presiden yang diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 telah membuka ruang kontestasi dalam memperebutkan kekuasaan dan legitimasi kekuasaan politik. Telah tiga kali terjadi pergantian presiden sebagai bagian dari proses demokrasi di tingkat nasional dan daerah. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Langsung Tahun 2004 merupakan pengalaman baru dan telah berlangsung ke dua kalinya bagi Bangsa Indonesia, sebagai salah satu kajian demokrasi presidensial. UU No. 23 Tahun 2003. Di tingkat daerah, di beberapa Provinsi dan Kabupaten telah hampir memasuki kali ke dua dalam pemilihan Kepala Daerah secara langsung. Tingginya bias konflik dalam Pilkada, menyebabkan wacana tentang Pilkada Gubernur belakangan akan dikembalikan pada system pemilihan melalui DPRD Provinsi.

Adanya jarak antara pemilu dengan sirkulasi elit di masa orde baru disebabkan tertutupan politik dengan adanya pemusatan kekuasaan di tangan Suharto, yang setelah reformasi terjadi sirkulasi elit yang terbuka

dan kompetitif dimulai Pemilihan Umum 1999 yang disusul pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Langsung 2004. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974, pemerintah daerah sangat bercorak sentralistik, dekonsentrasi administratif, dimana pemilihan dan penentuan pejabat kepala daerah yang harus memperoleh persetujuan presiden. Namun sejak runtuhnya otoriter orde baru, bermunculan tuntutan berbagai daerah agar mereka dapat menentukan sendiri kepala daerah masing-masing. Sehingga muncul Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 sebagai hasil reformasi politik. Pergeseran tersebut bertujuan menciptakan pemberdayaan politik masyarakat lokal yang dalam pelaksanaannya masih terbatas pada legislative daerah.

Dalam sejarah Indonesia sampai pada masa orde baru, pilkada selalu dimonopoli oleh elite politik pusat dan daerah dengan tidak memberi kesempatan rakyat memilih secara langsung kepala daerah dan wakil kepala daerahnya. Adanya perbedaan tata cara dan mekanisme pemilihan yang selama ini dikonstruksi untuk memilih anggota legislative serta presiden dan wakil presiden yang melibatkan partisipasi rakyat dalam menggunakan hak pilihnya. Namun sebaliknya pilkada dilakukan dengan sistem pemilihan perwakilan oleh anggota dewan atau diangkat/ditunjuk oleh pejabat pusat. Sebagai koreksi atas sistem pemilihan sebelumnya dan salah satu produk era reformasi adalah UU No.22.

**D. SKEMA PIKIR**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini yang akan dibahas ada lima aspek yaitu : Objek Penelitian, Dasar dan Tipe Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, dan Teknik Analisa. Kelima hal tersebut akan diuraikan lebih lanjut.

#### **A. Objek Penelitian**

Objek Penelitian yakni masyarakat kota Makassar, Kabupaten Gowa dan Kabupaten Sinjai yang sesuai dengan judul penelitian yang diangkat oleh peneliti, yakni menyangkut penerimaan masyarakat terhadap calon gubernur Sulawesi Selatan periode 2013-2018 sehingga penelitian akan lebih difokuskan di ketiga Kota/ kabupaten tersebut.

#### **B. Tipe dan dasar penelitian**

Dasar pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif memiliki beberapa prespektif teori yang dapat mendukung penganalisaan yang lebih mendalam terhadap gejala yang terjadi, dikarenakan kajiannya adalah fenomena masyarakat yang selalu mengalami perubahan (dinamis), yang sulit diukur dengan menggunakan angka-angka maka penelitian ini membutuhkan analisa yang lebih mendalam dari sekedar penelitian kuantitatif yang sangat bergantung pada kuantifikasi data. Penelitian ini mencoba



memahami apa yang dipikirkan oleh masyarakat terhadap suatu fenomena.

Tipe penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu penelitian diarahkan untuk menggambarkan penerimaan masyarakat terhadap ketiga calon Gubernur Sulawesi Selatan tersebut dengan argument yang tepat. Penelitian dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Informasi yang dimaksud adalah tingkat penerimaan social terhadap ketiga calon tersebut di Kota Makassar, kabupaen Sinjai dan kabupaten Gowa.

### **C. Sumber Data**

Pada penelitian ini penulis menggunakan data yang menurut penulis sesuai dengan objek penelitian dan memberikan gambaran tentang objek penelitian adapun sumber data yang digunakan yaitu:

#### **3.C.1. Data Primer**

Data diperoleh melalui studi lapangan dengan menggunakan teknik wawancara. Dalam pelaksanaan teknik ini, penulis telah mengumpulkan data melalui komunikasi langsung dengan para informan dan menggunakan beberapa alat untuk membantu dalam penelitian ini diantaranya alat tulis dan alat perekam. Informan disini adalah masyarakat dari ketiga wilayah yaitu Kota Makassar, Kabupaten Gowa dan kabupaten Sinjai.

#### **3.C.2. Data Sekunder**

Data diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan data dari buku, jurnal, media cetak, serta informasi tertulis lainnya yang berkaitan dengan strategi politik yang dilakukan maupun yang akan direncanakan. Selain itu, juga terdapat situs-situs atau website yang telah diakses untuk memperoleh data yang lebih akurat.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu:

##### **3.D.1. Wawancara**

Informan yang dipilih adalah informan yang benar paham dan mengetahui permasalahan yang dimaksud. Dalam studi penelitian ini, peneliti ingin mengetahui tentang penerimaan masyarakat yang menjelang pemilihan secara langsung Gubernur Sulawesi Selatan 2013 di Kota Makassar. Pemilihan informan yang akan peneliti wawancarai yaitu para Masyarakat yang berdomisili di ketiga wilayah yaitu Kota Makassar, Kabupaten Gowa dan kabupaten Sinjai dijadikan informan dari penelitian ini adalah individu-individu yang berkaitan dengan fokus penelitian.

##### **3.D.2. Dokumen**

Dokumen ini berisi tentang berbagai hal yang berkaitan dengan fokus penelitian yang merupakan salah satu sumber data

yang penting dalam penelitian. Dokumen yang dimaksud berupa dokumen tertulis yang telah diperoleh dari media cetak dan media elektronik (internet), data statistik, laporan penelitian sebelumnya, tulisan-tulisan ilmiah yang juga merupakan dokumen penting yang telah ditelusuri untuk memperkaya data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini.

#### **E. Teknik Analisa**

Karena metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Kualitatif Deskriptif maka teknik data yang digunakan adalah data kualitatif yang diperoleh melalui wawancara mendalam kepada informan atau responden yang tahu betul tentang strategi politik pasangan calon. Teknik analisisnya yaitu menelaah seluruh data wawancara dari berbagai sumber, mereduksi dengan jalan membuat abstraksi. Disinilah akan diketahui ada atau tidaknya perbedaan pandangan atau pemikiran tentang suatu objek, antara data wawancara yang satu dengan yang lainnya.

## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM**

#### **A. SYAHRUL YASIN LIMPO**

Syahrul Yasin Limpo Adalah gubernur Sulawesi selatan saat ini (2014), dikenal dengan sebutan SYL. Program utama mereka adalah Pendidikan dan Kesehatan Gratis.

- Nama : DR. H. Syahrul Yasin Limpo, SH, M.Si, MH
- Tempat dan tanggal lahir : Makassar, 15 Maret 1955
- Alamat tempat tinggal : Jalan Yusuf Dg. Ngawing, Makassar
- Agama : Islam
- Nama Istri : Drg. Hj. AYU SRI HARAHAP
- Pekerjaan : Gubernur Sulawesi Selatan
- Riwayat Pendidikan : a. SD Neg. Mangkura-Makassar Tahun 1967; b. SMP Neg. 6 Makassar Tahun 1970; c. SMA Katolik Cendrawasih Makassar Tahun 1973; d. Sarjana Hukum UNHAS (S.1) Tahun 1983; e. Pasca Sarjana LAN-UNHAS (S.2) Tahun 1999; f. Pasca Sarjana UNHAS(S.2) Tahun 2004; g. Pasca UNHAS (S.3) Tahun 2008.

- Pengalaman Organisasi : 1. Sekretaris DPP KNPI Sul-Sel Tahun 1990-1993; 2. Ketua DPP AMPI Sul-Sel Tahun 1993-1998; 3. Sekretaris DPP GOLKAR Sul-Sel Tahun 1993-1998; 4. Wakil Ketua APKASI Pusat; 5. Ketua FKPPi Sul-Sel Tahun 2004-2008; 6. Ketua FORKI Sul-Sel Tahun 2004-2008; 7. Ketua Kwarda Gerakan Pramuka Tahun 2004-sekarang; 8. Ketua KOSGORO 57 Tahun 1998-sekarang; 9. Ketua ORARI Sul-Sel; Ketua DPD I Golkar Sulsel tahun 2009-sekarang.
- Pengalaman Pekerjaan : 1. Diangkat PNS Tahun 1980; 2. Kepala Seksi Tata Kota Tahun 1982; 3. Kepala Sub Bagian Perangkat IV & V PD. Biro Pemerintahan Umum Tahun 1983; 4. Kepala Wilayah Kec. Bontonompo Kabupaten Gowa. Tahun 1984; 5. Kepala Bagian Pemerintahan Setwilda Tk. I Sul-Sel Tahun 1987; 6. Kepala Bagian Pembangunan Setwilda Tk. I Sul-Sel Tahun 1988; 7. Kepala Bagian Urusan Generasi Muda & OR Setwilda Tk. I Sul-Sel Tahun 1989; 8. Sekretaris Wilayah Daerah Tk. II; Kabupaten Gowa Tahun 1991; 9. Kepala Biro Humas Setwilda Tk. I Sul-Sel Tahun 1993; 10. Bupati Kepala Daerah Tk. II Kab.Gowa Tahun 1994-2002; 11. Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2003-2008, Gubernur Sulsel 2008-sekarang.

Syahrul Yasin Limpo yang lebih dikenal dengan nama SYL telah mencanangkan Pendidikan dan kesehatan Gratis Di Sulawesi selatan, program ini merupakan program unggulan SYL bersama pasangannya

Agus Arifin Nu'mang selaku wakil Gubernur pasangan SYL. Program pendidikan gratis sudah berjalan di beberapa kabupaten di Sulsel, dan pada tahun 2012 ini rencananya Pendidikan Gratis untuk SMA akan berlaku di seluruh provinsi Sulsel. Kesehatan gratis telah berjalan dengan baik di Sulsel, Dengan KTP dan KK rakyat Sulsel sudah bisa menikmati fasilitas Rumah sakit secara gratis dan pelayanannya juga sama seperti seperti pasien umum lainnya. Disamping itu SYL selaku Gubernur telah membuktikan diri dalam membangun Sulsel, prasarana jalan sudah banyak yang di beton sehingga rakyat nyaman dalam menggunakan prasarana tersebut, disamping itu SYL juga menerima banyak penghargaan dari pemerintah Pusat dan penghargaan yang tertinggi beliau adalah Bintang Maha Putera Utama. SYL juga masuk ke dalam nominator terbaik Kepala Daerah Tingkat Dunia, serta banyak prestasi SYL lagi yang menginspirasi dan memberi dedikasi yang tinggi kepada Sulawesi Selatan secara khusus dan Indonesia Secara Umum.

## **B. ILHAM ARIEF SIRADJUDDIN**

### Biografi Ilham Arief Sirajuddin

#### Data Pribadi

Nama Lengkap : Ir. H. ILHAM ARIEF SIRADJUDDIN, MM.

Tempat Lahir : Makassar

Tanggal Lahir : 16 September 1965

Alamat : Jl. Sungai Saddang No. 54 Makassar

Jabatan : Walikota Makassar

Ketajaman politik Ilham mulai terlihat ketika ia bergabung dengan Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Sulsel, sayap pemuda di Partai Golkar. Sebelumnya, ia sudah menjadi aktivis di Forum Komunikasi Putra Putri dan Purnawirawan TNI (FKPPI). Karir politiknya terus menjulang di usia yang sangat muda ketika ia sukses menembus parlemen Sul-Sel pada Pemilu 1999. Kesuksesannya mendapat posisi Ketua DPD II Golkar Makassar di tahun 2004, makin menegaskan posisinya di ranah politik daerah ini.

Namun, Ilham mampu membuktikan ketajaman berpolitiknya.la sukses memenangkan pertarungan itu dan kemudian terpilih menjadi Walikota Makassar. Dalam sebuah acara sakral yang dilakukan tetap di depan Benteng Fort Rotterdam Makassar, pada 8 Mei 2004, Ilham yang berpasangan dengan Andi Herry Iskandar, dilantik sebagai Walikota dan Wakil Walikota Makassar, periode 2004 - 2009. Dalam empat tahun kepemimpinannya, telah teruji membawa perubahan yang sangat signifikan di Kota Makassar<sup>12</sup>, berikut perjalanan karir politik Ilham Arif Sirajuddin<sup>13</sup>.

**Tabel 1. Perjalanan Karir Politik Ilham Arief Sirajuddin**

No	Jabatan dalam karir Politik Ilham Arief Sirajuddin
1	Wakil Bendahara DPD II Golkar Makassar

<sup>12</sup><http://www.gudangmateri.com/2010/03/biografi-ilham-arief-sirajuddin.html> diakses pukul 13.43 tgl 1-agustus-2012

<sup>13</sup>[http://id.wikipedia.org/wiki/Ilham\\_Arief\\_Sirajuddin](http://id.wikipedia.org/wiki/Ilham_Arief_Sirajuddin) diakses pukul 03.30 Wita Tgl. 31-10-2012

2	Ketua Biro Pemuda dan Olahraga DPD I Golkar Sulawesi Selatan
3	Ketua DPD. Partai Golkar Kota Makassar
4	Anggota DPRD Sulawesi selatan
5	Ketua Kompartemen Koperasi KADIN Sulsel
6	Walikota Makassar
7	Ketua Golkar DPD I Sulawesi Selatan
8	Ketua DPD I Partai Demokrat Sulawesi-Selatan

### C. ANDI RUDIYANTO ASAPA

Nama Lengkap : Andi Rudiyanto Asapa, SH, LLM

TTL : Gorontalo / 26 Mei 1967

Agama : Islam

Pekerjaan : Bupati Sinjai

Andi Rudiyanto Asapa Adala calon Gubernur Sulawesi Selatan 2013-2018 pada saat pencalonannya ia menjabat sebagai bupati Sinjai. Dia uga ketua partai Gerindra Sulawesi Selatan . Andi Rudiyanto Asapa



mengusung TAG line Garuda for Sulsel yang berpasangan dengan Andi Nawir Pasinringi.

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

Penerimaan masyarakat terhadap seorang calon pemimpin adalah hal yang mutlak dibutuhkan penerimaan yang baik masyarakat terhadap seseorang akan berdampak baik terhadap legitimasi kepemimpinan tersebut jika benar-benar memimpin masyarakat tersebut. Salah satu perubahan yang mendasar dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu proses seleksi kepemimpinan eksekutif ditingkat lokal tidak lagi dipilih oleh anggota DPRD, tapi langsung oleh rakyat. Dalam konteks semangat otonomi daerah, pemilihan kepala daerah secara langsung (Pemilukada langsung) menjadi pilihan/cara tepat. Dengan sistem ini masyarakat menjadi lebih memiliki kesempatan untuk terlibat secara langsung dalam proses pemilihan kepala daerah. Artinya, masyarakat pantas menjadi kepala daerahnya. Salah satu payung hukum dari hal tersebut adalah UU No. 32 Tahun 2004.

Pemilukada diharapkan mampu melahirkan kepala daerah pemerintahan di tingkat lokal yang bisa memenuhi preferensi mayoritas masyarakat lokal dan mempercepat terbentuknya pemerintahan daerah yang lebih baik (*good governance*). Dengan begitu, dari sisi substansi, pemilukada diharapkan bisa melakukan proses seleksi pemimpin yang dinilai rakyatnya terbaik untuk melakukan perubahan-perubahan yang

menjanjikan dan memberi manfaat kepada masyarakat luas. Selain itu, pemilukada langsung merupakan sebuah wujud pelimpahan kewenangan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, termasuk keleluasan menyelenggarakan pemilukada tanpa intervensi dari pihak manapun.

#### **A. Faktor-Faktor penerimaan masyarakat Sulawesi Selatan terhadap Ilham Arief Siradjuddin**

Ilham Arief Siradjuddin memiliki akseptabilitas kepemimpinan di beberapa daerah di Sulawesi Selatan dikarenakan Ilham Arief Siradjuddin merupakan Walikota Makassar yang menjabat selama dua periode. Pak Ilham merupakan Walikota Makassar yang kurang lebih 9 tahun telah menjabat dalam periode tersebut Ilham telah memberikan bukti nyata terhadap masyarakat seperti pembangunan dan tingkat pendapatan masyarakat kota Makassar yang meningkat drastis. Beberapa contoh konkrit keberhasilan Ilham di kota Makassar diantaranya pembangunan Karebosi, anjungan pantai Losari, masjid terapung dan masing-masing RW dan RT mendapatkan dana insentif. Kedekatan yang dimiliki Ilham Arief Siradjuddin terhadap masyarakat berupa kedekatan kekeluargaan yang dianggap Ilham masyarakat sama semua dimatanya dan tidak pilih-pilih serta ramah dan memperhatikan rakyat kecil.

“Kalau saya Pak Ilham InsyaAllah dia menang disini (Makassar) kita lihat. Hasil survey kemarin terakhir Aziz Qahar Mudzakkar Luwu

raya, hasil survey 76% masih tetap Ilham-Aziz. Pak Aziz kalau ketokohan juga tidak ada yang meragukan kalau Pak Aziz kan dia punya massa ideologi<sup>14</sup>.

Untuk menganalisa hal diatas, penulis merujuk dengan apa yang dikatakan Pareto dalam teori Elit politik bahwa dalam setiap masyarakat, elit yang memerintah mencoba menemukan basis moral dan hukum bagi keberadaannya dalam benteng kekuasaan serta mewakilinya sebagai "konsekuensi yang perlu dan logis atas doktrin-doktrin dan kepercayaan-kepercayaan yang secara umum telah dikenal dan diterima. "InsyaAllah saya selalu mengatakan bahwa target kita 70% Makassar, kenapa saya katakan figur Pak Ilham sudah cukup dikenal dan sudah bisa dilihat kenyataan dari pembangunannya selama tujuh tahun banyak saya kira masyarakat cukup cerdas melihat Pak Ilham"<sup>15</sup>.

Tapi tim pemenangan Ilham Arief Sirajuddin tetap melakukan sosialisasi personal, bersama timnya yang gunanya menimbulkan citra positif dalam diri/figur yang diusung. Menurut Jalaluddin Rakhmat; Citra diri seseorang memberikan cara menghubungkan dirinya dengan orang lain<sup>16</sup>. Sosialisasi ini dilakukan dilingkungan keluarga masyarakat umum dan juga pada kalangan birokrasi yang berada pada tingkat Kota maupun

---

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Kemal, Ketua Tim Teras Muda Kota Makassar, Tanggal 15 September 2012, Pukul 11.40 Wita

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Adi Rasyid Ali, SE. Ketua DPD II Partai Demokrat Kota Makassar Tanggal, 18 September 2012 Pukul 10.14 Wita.

<sup>16</sup> Rakhmat, Jalaluddin. Komunikasi Politik. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung. 2000. Hlm. 7

desa/kelurahan di Kota Makassar Menurut Adi Rasyid Ali, SE yang diwawancarai terkait hal ini, juga menuturkan hal yang hampir sama:

“kita pegang Kepala Desanya/Kelurahannya, kalau ternyata dia semua pegang perangkat itu kita pegang tokoh-tokoh masyarakat atau tokoh-tokoh pemuda, tokoh-tokoh agama kita berikan pendidikan politik masyarakat dibawah karena sesungguhnya kekuatan itu lebih in power ada di masyarakat dan di tokoh-tokoh masyarakat saja”<sup>17</sup>.

Tokoh masyarakat yang cukup memegang peran dalam lingkungan masyarakat dan sangat dekat dengan pemilih dan memiliki kedekatan emosional yang menjadi bawahannya menjadikan kekuatan masyarakat di tingkat desa/kelurahan adalah dari pengaruh para pemimpinnya dalam lembaga yang berada di desa/kelurahan agar menjadi kehormatan suatu masyarakat dalam wilayah tertentu. Strategi ini dianggap efektif untuk memilih pasangan IA.

Sosialisasi ini tentunya menekankan bahwa pasangan Ilham Arief Sirajuddin dan Aziz Qahar Mudzakkar akan mengakomodir aspirasi/kepentingan mereka. Apalagi sosok Ilham Arief Sirajuddin telah sangat dikenal oleh kalangan-kalangan birokarasi terlebih lagi Ilham Arief Sirajuddin sebagai Walikota Makassar, ini merupakan kemenangan tersendiri untuk pasangan Ilham Arief Sirajuddin dan Aziz Qahar

---

<sup>17</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Adi Rasyid Ali, SE. Ketua DPD II Partai Demokrat Kota Makassar Tanggal, 18 September 2012 Pukul 10.14 Wita.

Mudzakkar. Menentukan sebuah istilah/kata yang diperoleh tagline pasangan Ilham-Aziz tersebut, contohnya **“SEMANGAT BARU”**.Istilah tersebut disertakan pada setiap sosialisasi pasangan ini. Termasuk penentuan/pembuatan gambar, tulisan pada baliho, spanduk, dll, yang kemudian dijadikan sebagai media perantara dalam mensosialisasikan pasangan calon ini, hal ini diungkapkan oleh Bapak Kemal yakni :

“kalau Ilham-Aziz kan mereka baru asumsinya dengan menggunakan semangat baru itu kan enak, lebih gampang dicerna, itu kalau tidak membuat tagline harus memang kata-katanya tidak usah panjang singkat padat, <sup>18</sup>.

## **B. Faktor-faktor penerimaan masyarakat Sulawesi Selatan terhadap Syahrul Yasin Limpo**

Pasangan SAYANG diunggulkan daripada calon-calon yang lain di beberapa daerah di Sulawesi Selatan terlebih lagi di Kabupaten Gowa. Banyak kalangan yang melihat hal ini dikarenakan ada aspek kultural yang mendasari penerimaan masyarakat terhadap pasangan ini terutama dalam pribadi Syahrul Yasin Limpo yang perlu dicatat adalah Bupati Gowa saat ini adalah adik daripada SYL yaitu Ikhsan Yasin Limpo. Berikut ini adalah penjabaran dari

---

<sup>18</sup>Hasil wawancara dengan Masyarakat kota Gowa, Tanggal 15 September 2012, Pukul 11.40 Wita.

faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan masyarakat seperti kedekatan dengan masyarakat, kesamaan, daya tarik pribadi calon, kepercayaan, kewibawaan, motivasi, penawarannya, pesan beserta cara penyampaiannya, status, kekuatan politik dan kewenangannya.

Pasangan SAYANG diunggulkan daripada calon-calon yang lain di beberapa daerah di Sulawesi Selatan terlebih lagi di Kabupaten Gowa. Banyak kalangan yang melihat hal ini dikarenakan ada aspek kultural yang mendasari penerimaan masyarakat terhadap pasangan ini terutama dalam pribadi Syahrul Yasin Limpo yang perlu dicatat adalah Bupati Gowa saat ini adalah adik daripada SYL yaitu Ikhsan Yasin Limpo. Berikut ini adalah penjabaran dari faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan masyarakat seperti kedekatan dengan masyarakat, kesamaan, daya tarik pribadi calon, kepercayaan, kewibawaan, motivasi, penawarannya, pesan beserta cara penyampaiannya, status, kekuatan politik dan kewenangannya.

“Pak Syahrul orangnya sangat dekat dengan masyarakat beliau kalo ketemuarganya beliau berjabat tangan dan cipika cipiki,<sup>19</sup>

“Beliau adalah orang yang sangat ramah siapapun beliau temui “,<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup>Hasil wawancara dengan Masyarakat kota Makassar , Tanggal 17 September 2012, Pukul 14.40 Wita.

<sup>20</sup>Hasil wawancara dengan Masyarakat Kabupate Gowa , Tanggal 17 September 2012, Pukul 10.25 Wita.

**SAYANG** diunggulkan daripada calon-calon yang lain di beberapa daerah di Sulawesi Selatan terlebih lagi di Kabupaten Gowa. Banyak kalangan yang melihat hal ini dikarenakan ada aspek kultural yang mendasari penerimaan masyarakat terhadap pasangan ini terutama dalam pribadi Syahrul Yasin Limpo yang perlu dicatat adalah Bupati Gowa saat ini adalah adik daripada SYL yaitu Ikhsan Yasin Limpo. Berikut ini adalah penjabaran dari faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan masyarakat seperti kedekatan dengan masyarakat, kesamaan, daya tarik pribadi calon, kepercayaan, kewibawaan, motivasi, penawarannya, pesan beserta cara penyampaiannya, status, kekuatan politik dan kewenangannya.

Syahrul Yasin Limpo adalah calon Gubernur *incumbent* yang mencalonkan diri dalam Pilkada Sulawesi Selatan 2013. SYL maju berpasangan dengan Agus Arifin Nu'mang yang juga merupakan pasangan Syahrul sebagai wakilnya. Kedekatan dan kesamaan Syahrul Yasin Limpo dengan masyarakat Gowa adalah berupa kedekatan dan kesamaan secara kultural yang dimana Syahrul sebagai orang asli Gowa. Masyarakat kabupaten Gowa yang masih menganut budaya politik parokial yaitu budaya politik yang masih tradisional. SYL juga dianggap representatif dan mewakili karakter Bugis-Makassar sehingga ia dapat diterima oleh masyarakat Sulawesi Selatan. Syahrul memiliki daya tarik tersendiri dibanding calon Gubernur lain yang dimana ia mampu berkomunikasi dengan



baik kepada masyarakat. Kredibilitas Syahrul di mata masyarakat tidak dipertanyakan lagi karena beliau sudah terbukti dalam kepemimpinannya mampu menjalankannya dengan baik.

### **C. Faktor-faktor penerimaan masyarakat Sulawesi Selatan terhadap Andi Rudiyanto Asapa.**

Pasangan Garuda'na adalah pasangan Andi Rudiyanto Asapa yang menjabat sebagai Bupati Sinjai dengan masa jabatan dua periode dan Andi Nawir Pasinringi pasangannya adalah Mantan Bupati Pinrang. Pasangan dengan nomor urut 3 ini digadang-gadang unggul hanya di Kabupaten Sinjai dan itupun menurut data sekunder penelitian yang menjadi salah satu dasar penelitian ini dikatakan bahwa pasangan SAYANG menempel pada perkiraan perbandingan 2 persen dibawah keunggulan Garuda'na. Jika melihat akseptabilitas pasangan ini menarik jika melihat pada dua kabupaten yang menjadi basis dari kedua pesaingnya yaitu Makassar dan Gowa.

“kedekatan pak Rudi dengan kami adalah ia seorang ketua partai kami “<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup>Hasil wawancara dengan Masyarakat kota Makassar , Tanggal 21 September 2012, Pukul 18.05 Wita.

Masyarakat memberikan penilaian yang berupa factor kesamaan yaitu berasal dari satu partai yang berarti atau ideologi

“Beliau tau menempatkan dirinya pada posisi yang benar”<sup>22</sup>

Kutipan diatas menandakan bahwasanya penerimaan pun bias berasal dari masyarakat salah satu pendukung kandidat pesaingnya.

Pasangan dengan nomor urut 3 ini digadang-gadang unggul hanya di Kabupaten Sinjai dan itupun menurut data sekunder penelitian yang menjadi salah satu dasar penelitian ini dikatakan bahwa pasangan SAYANG menempel pada perkiraan perbandingan 2 persen dibawah keunggulan Garuda'na. Jika melihat akseptabilitas pasangan ini menarik jika melihat pada dua kabupaten yang menjadi basis dari kedua pesaingnya yaitu Makassar dan Gowa. Andi Rudiyanto Asapa mencalonkan diri dalam Pilkada Sulawesi Selatan berpasangan dengan Andi Nawir Pasinringi dan Andi Rudiyanto Asapa menjabat sebagai bupati Sinjai. Kedekatan dan kesamaan Andi Rudiyanto Asapa adalah karena ia sebagai pemimpin dan putra daerah dari Sinjai. Beliau juga dikenal sangat ramah dan terbuka dengan masyarakat yang dipimpinnya. Namun demikian kedekatan dan kesamaan Rudiyanto dengan masyarakat Sulawesi Selatan tidak tercakup keseluruhan hanya masyarakat kabupaten Sinjai yang

---

<sup>22</sup>Hasil wawancara dengan masyarakat Kabupaten Gowa (pendukung tim SAYANG) , Tanggal 22 September 2012, Pukul 14.35 Wita.

memiliki penerimaan yang cukup besar terhadap beliau dibanding ketiga daerah lainnya.

Daya tarik yang dimiliki oleh Rudyanto dikarenakan pribadinya yang ramah dan dikenal terbuka dengan masyarakat seperti yang dituturkan oleh masyarakat dan tim sukses sebagai responden. Motivasi dan penawaran utama dari Rudyanto adalah untuk mensejahterakan masyarakat dan menjalankan pemerintahan yang bersih dari korupsi. Andi Rudyanto asapa hanya memiliki tingkat penerimaan masyarakat di daerah yang dipimpinnya yaitu hanya kabupaten Sinjai sedangkan di dua daerah lain akseptabilitas dimiliki oleh kedua pasang yang menjadi pesaingnya yaitu Syahrul Yasin Limpo dan Ilham Arief Siradjuddin.

## BAB VI

### PENUTUP

#### **A. Kesimpulan penerimaan masyarakat terhadap Ilham Arief Siradjuddin.**

Penerimaan masyarakat terhadap calon Gubernur dalam hal ini Ilham Arief Siradjuddin di tiga daerah yang menjadi lokasi penelitian yaitu kota Makassar, kabupaten Gowa dan kabupaten Sinjai. Kota Makassar merupakan salah satu daerah yang menjadi basis kekuatan daripada Ilham yang merupakan walikota Makassar. Status Ilham sebagai walikota Makassar, ketua DPD Demokrat Sul-Sel dan juga ketua ormas Nas-Dem. Kekuatan politik Ilham pun cukup besar dalam meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap dirinya. Namun cakupan otoritas yang dimiliki oleh Ilham di kota Makassar maka hanya efektifitas penerimaan masyarakatnya berada di kota Makassar dibanding kedua daerah lainnya.

#### **B. Kesimpulan penerimaan masyarakat terhadap Syahrul Yasin Limpo.**

Syahrul Yasin Limpo adalah calon Gubernur *incumbent* yang mencalonkan diri dalam Pilkada Sulawesi Selatan 2013. SYL maju berpasangan dengan Agus Arifin Nu'mang yang juga merupakan pasangan Syahrul sebagai wakilnya. Kedekatan dan kesamaan Syahrul Yasin Limpo dengan masyarakat Gowa adalah berupa kedekatan dan kesamaan secara kultural yang dimana Syahrul sebagai orang asli Gowa. Masyarakat kabupaten Gowa yang masih

menganut budaya politik parokial yaitu budaya politik yang masih tradisional. SYL juga dianggap representatif dan mewakili karakter Bugis-Makassar sehingga ia dapat diterima oleh masyarakat Sulawesi Selatan. Syahrul memiliki daya tarik tersendiri dibanding calon Gubernur lain yang dimana ia mampu berkomunikasi dengan baik kepada masyarakat. Kredibilitas Syahrul di mata masyarakat tidak dipertanyakan lagi karena beliau sudah terbukti dalam kepemimpinannya mampu menjalankannya dengan baik.

### **C. Kesimpulan penerimaan masyarakat terhadap Andi Rudyanto**

#### **Asapa**

Andi Rudyanto Asapa mencalonkan diri dalam Pilkada Sulawesi Selatan berpasangan dengan Andi Nawir Pasinringi dan Andi Rudyanto Asapa menjabat sebagai bupati Sinjai. Kedekatan dan kesamaan Andi Rudyanto Asapa adalah karena ia sebagai pemimpin dan putra daerah dari Sinjai. Beliau juga dikenal sangat ramah dan terbuka dengan masyarakat yang dipimpinnya. Namun demikian kedekatan dan kesamaan Rudyanto dengan masyarakat Sulawesi Selatan tidak tercakup keseluruhan hanya masyarakat kabupaten Sinjai yang memiliki penerimaan yang cukup besar terhadap beliau dibanding ketiga daerah lainnya.

Daya tarik yang dimiliki oleh Rudyanto dikarenakan pribadinya yang ramah dan dikenal terbuka dengan masyarakat seperti yang dituturkan oleh masyarakat dan tim sukses sebagai responden. Motivasi dan penawaran utama dari Rudyanto adalah untuk mensejahterakan masyarakat dan menjalankan pemerintahan yang bersih dari korupsi. Andi Rudyanto asapa hanya memiliki tingkat penerimaan masyarakat di daerah yang dipimpinnya yaitu hanya kabupaten Sinjai sedangkan di dua daerah lain akseptabilitas dimiliki oleh kedua pasang yang menjadi pesaingnya yaitu Syahrul Yasin Limpo dan Ilham Arief Siradjuddin.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Anwar. 2003. *Komunikasi Politik: Paradigma-Teori-Aplikasi Strategi dan Komunikasi Politik Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Hamad, Ibnu. 2004. *Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa (Sebuah Studi Critical Discourse Analysis terhadap Berita-berita Politik)*. Jakarta: Penerbit Granit.
- Herry, Achmad. 2005. *9 Kunci Sukses, Tim Sukses dalam Pilkada Langsung*, Galang Press, Yogyakarta, 2005
- Kamus Longman *Dictionary of Contemporary English*, 1982. The Pitman Press, Bath, Great Britain.
- Nasution, Noviantika. 2006. *Bobolnya Kandang Banteng : Sebuah Otokritik*. Jakarta: Penerbit Suara Bebas.
- Nimmo, Dan. 2005. *Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan, dan Media*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nursal, Adman. 2004. *Political Marketing: Strategi Memenangkan Pemilu*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Rakhmat, Jalaluddin. 2000. *Komunikasi Politik*. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya.
- Ruslan, Rosady. 2005. *Kiat dan Strategi Kampanye Public Relations*. Jakarta: PTRajawali Pers.
- Sanit, Arbi. 1985. *Perwakilan Politik di Indonesia*, Jakarta : CV. Rajawali.
- Schroder, Peter. 2004. *Strategi Politik*. Jakarta : Nomos, Baden-Baden.
- Venus, Antar. 2004. *Manajemen Kampanye*. Bandung: SimbiosisRekatamaMedia.

### **Sumber Lain**

Amir, Fauziah. 2006. Strategi Kampanye Politik di Media Massa oleh Pasangan SBY-JK dalam Kampanye pemilihan Presiden langsung 2004. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Depok: Universitas Indonesia.

Suryatna, Undang. 2007. *Hubungan Karakteristik Pemilih dan Terpaan Informasi Kampanye Politik dan Perilaku Memilih (Kasus Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2006)*. Tesis. Sekolah Pasca Sarjana. Bogor: Institut Pertanian Bogor.

Tomaito, Subkhan. 2011. Strategi Politik Aristokrasi di Pemilu. Tesis S2. Universitas Gadjah Mada.

Undang - Undang No. 32 Tahun 2004.

Undang - Undang No. 22 Tahun 1999.

### **Sumber Internet**

[\(http://biarhappy.wordpress.com/2011/04/11/teori-elite-politik/\)](http://biarhappy.wordpress.com/2011/04/11/teori-elite-politik/)

[http://id.wikipedia.org/wiki/Ilham\\_Arief\\_Sirajuddin](http://id.wikipedia.org/wiki/Ilham_Arief_Sirajuddin)

<http://news.okezone.com/read/2012/09/08/340/686930/redirect>

<http://www.google.co.id/>

<http://www.gudangmateri.com/2010/03/biografi-ilham-arief-sirajuddin.html>

[\(http://www.taushiyah.com/?p=345\)](http://www.taushiyah.com/?p=345)

